E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1456-1465
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Madrasah Ibtidaiyah Talegong Asli Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Irham Ahsani Taqwim

Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu AdministrasI YPPT Priatim Tasikmalaya
e-mail: irhamahsani88@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional karena tidak hanya ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap berbagai kebutuhan dasar, termasuk layanan pendidikan yang layak. Memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar di lingkungan madrasah. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan informan yang terdiri atas kepala madrasah, tenaga administrasi, guru, serta orang tua siswa penerima maupun nonpenerima bantuan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai implementasi kebijakan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar di MI Talegong Asli telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Proses penetapan calon penerima bantuan mengacu pada kriteria yang berlaku serta didasarkan pada data resmi yang telah diverifikasi. Penyaluran dana bantuan dilakukan secara langsung melalui rekening masing-masing peserta didik dan dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembelian perlengkapan sekolah, seragam, buku, dan biaya penunjang pembelajaran. Keberhasilan pelaksanaan program didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai, koordinasi internal yang berjalan efektif, serta komunikasi yang baik antara pihak madrasah, orang tua, dan instansi terkait. Meskipun masih dijumpai beberapa kendala teknis dan dinamika dalam proses pelaksanaannya, hambatan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi dan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak madrasah. Secara keseluruhan, implementasi Program Indonesia Pintar memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akses, keberlangsungan, dan pemerataan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu di Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, Akses Pendidikan

E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1456-1465
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Abstract

Poverty is a multidimensional development issue, as it is characterized not only by low income levels but also by limited access to essential basic needs, including adequate educational services. This study aims to obtain a comprehensive understanding of the implementation of the Program Indonesia Pintar (PIP) policy within the madrasa environment. The research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies involving the madrasa principal, administrative staff, teachers, and parents of both beneficiary and non-beneficiary students. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to provide a comprehensive understanding of the implementation of the policy under investigation. The findings indicate that the implementation of the Program Indonesia Pintar (PIP) at MI Talegong Asli has been carried out effectively in accordance with government regulations and established implementation mechanisms. The selection of program beneficiaries was based on the applicable eligibility criteria and verified official data. Financial assistance was transferred directly to each student's bank account and utilized to support various educational needs, including the purchase of school supplies, uniforms, textbooks, and other learning-related expenses. The successful implementation of the program was supported by competent human resources, effective internal coordination, and strong communication among the madrasa, parents, and relevant stakeholders. Although several technical challenges and implementation dynamics were encountered, these issues were successfully addressed through coordination and problem-solving efforts undertaken by the madrasa. Overall, the implementation of the Program Indonesia Pintar has made a significant contribution to improving educational access, ensuring educational continuity, and promoting equitable educational opportunities for students from low-income families in Salopa District, Tasikmalaya Regency

Keywords : *Policy Implementation, Program Indonesia Pintar, Educational Access*

LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah persoalan multidimensional yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Keadaan miskin tidak semata-mata ditunjukkan oleh keterbatasan pendapatan, tetapi juga tercermin dari rendahnya kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya, baik yang bersifat material, sosial, maupun spiritual. Di Indonesia, persoalan kemiskinan masih menjadi masalah serius, khususnya di wilayah perdesaan dan kawasan pinggiran perkotaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak.

Rendahnya mutu sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan sulit untuk diatasi. Kondisi seperti tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan yang terbatas, serta derajat kesehatan yang kurang memadai turut berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas dan penghasilan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sekitar

25,9 juta jiwa, dengan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi, yaitu sekitar 3,88 juta jiwa. Sementara itu, Kota Tasikmalaya memiliki garis kemiskinan sebesar Rp537.497 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 79,37 ribu orang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan yang serius, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu strategi paling efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan adalah melalui sektor pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, tingginya biaya pendidikan sering kali menjadi kendala bagi keluarga kurang mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan memerlukan pembiayaan yang cukup besar, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius dan berkelanjutan terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam penyelenggaraan dan penguatan sektor pendidikan.

Dalam proses pendidikan, berbagai aspek fundamental kehidupan manusia hadir sebagai fenomena universal yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia.

Hal ini dikarenakan pendidikan tidak hanya dipahami sebagai suatu gejala sosial, melainkan juga sebagai upaya sadar untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya kebudayaan manusia, pendidikan dituntut untuk menjadi lebih terstruktur dan didasarkan pada pemikiran yang matang. Manusia berupaya mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam membentuk generasi penerus agar mampu menjalani kehidupan secara lebih baik, baik dalam interaksi dengan sesama, lingkungan sekitar, maupun dalam hubungannya dengan Tuhan.

Friedrich dikutip (Islamy, 1986 hal. 9), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam situasi tertentu dengan mempertimbangkan berbagai kesulitan dan kemungkinan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Grindle dalam (Mulyadi, 2015, hal. 12) mengatakan, “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan.

(Nugroho, 2018, hal. 26), pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijaka publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi.

Menurut (Van Meter & Van Horn, 1975). implementasi kebijakan merupakan proses tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi pelaksanaan kebijakan tersebut

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya.
   Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.
   Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi berbentuk dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.
3. Karakteristik Agen pelaksana.
   Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat cocok dengan para agen pelaksanaanya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.
   Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4. Sikap atau kecenderungan *(Disposition)* Para Pelaksana.
   Sikap penerimaan atau penolakan dari (Agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' *(top down)* yang sangat mungkin para pengambill

keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
   Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil tejadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
   Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja impelementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena fokus penelitian ini adalah memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di MI Talegong Asli Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya. Menurut (Sugiyono, 2017, hlm. 16), pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menerut (Sugiyono, 2017) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik sampling purposive Teknik sampling purposive adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan jenis pertimbangan tertentu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan kepala madrasah, kepala bagian administrasi, kepala bagian kesiswaan, serta orang tua siswa penerima dan nonpenerima bantuan, dapat diketahui bahwa ukuran dan tujuan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di MI Talegong Asli Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya telah dipahami dengan cukup baik oleh para pelaksana. Program ini bertujuan membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan dan terhindar dari risiko putus sekolah. Penetapan penerima bantuan pada umumnya mengacu pada kriteria yang ditentukan pemerintah, termasuk kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan data kesejahteraan sosial yang relevan.

Dalam pelaksanaannya, pihak madrasah melakukan verifikasi internal untuk menyesuaikan data administrasi dengan kondisi sosial ekonomi peserta didik. Langkah tersebut diperlukan karena perubahan kondisi ekonomi keluarga tidak selalu langsung

tercermin dalam data pemerintah. Dari sisi manfaat, PIP membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti perlengkapan sekolah dan kebutuhan belajar lainnya. Dengan demikian, tujuan kebijakan telah diterjemahkan ke dalam pelaksanaan program di tingkat madrasah, meskipun ketepatan sasaran tetap perlu diperhatikan secara berkelanjutan.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian Rijal, Fathurrahman, dan Pranajaya (2018) mengenai evaluasi Program Indonesia Pintar di madrasah Kota Balikpapan. Penelitian tersebut menempatkan pelaksanaan PIP di lingkungan madrasah sebagai bagian penting dalam menilai kesesuaian program dengan tujuan bantuan pendidikan. Temuan tersebut relevan dengan kondisi MI Talegong Asli yang perlu memastikan bahwa bantuan diterima oleh peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian ini juga diperkuat oleh Purnama dan Dewi (2024) yang mengevaluasi Program Indonesia Pintar pada jenjang SMP di Kabupaten Bandung. Penelitian tersebut menggunakan aspek efektivitas, efisiensi, dan pemerataan untuk menilai pelaksanaan program. Hasil kajian tersebut relevan karena pencapaian tujuan PIP tidak hanya dilihat dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari kemampuan program menjangkau peserta didik yang membutuhkan secara tepat.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, sumber daya dalam pelaksanaan PIP di MI Talegong Asli meliputi sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sarana administrasi. Dana bantuan bersumber dari pemerintah dan disalurkan melalui mekanisme yang telah ditentukan kepada siswa penerima. Penyaluran tersebut pada umumnya berjalan sesuai prosedur, meskipun masih dimungkinkan terjadi keterlambatan akibat kendala administratif atau proses perbankan. Berdasarkan keterangan informan, tidak ditemukan adanya pemotongan atau penyimpangan dana di tingkat madrasah.

Dari aspek sumber daya manusia, operator EMIS, guru, wali kelas, dan staf administrasi memiliki peran dalam mendukung validitas data, kelengkapan dokumen, serta pendampingan kepada orang tua. Sarana administrasi juga membantu proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia relatif mendukung pelaksanaan PIP. Namun, ketepatan waktu penyaluran dan peningkatan kemampuan petugas dalam mengelola data tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal.

Penelitian ini diperkuat oleh Romanti, Aguswan, dan Ferizko (2023) yang mengkaji implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri 117 Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah didukung koordinasi dan sosialisasi, tetapi masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya, khususnya keterbatasan anggaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan PIP.

Penelitian ini juga diperkuat oleh Hamdi, Setiawan, dan Musyadad (2020) yang mengevaluasi implementasi Program Indonesia Pintar di sekolah menengah kejuruan. Penelitian tersebut menggunakan aspek konteks, masukan, proses, dan hasil untuk menilai pelaksanaan program. Relevansinya dengan penelitian di MI Talegong Asli terletak pada

pentingnya kesiapan sumber daya dan proses administrasi dalam mendukung penyaluran bantuan serta pencapaian tujuan program.

Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik agen pelaksana PIP di MI Talegong Asli terlihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab antara kepala madrasah, operator EMIS, staf administrasi, guru, dan wali kelas. Kepala madrasah berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan program, operator EMIS mengelola data peserta didik, staf administrasi membantu pengelolaan dokumen, sedangkan guru dan wali kelas menjadi penghubung antara pihak madrasah dengan orang tua siswa.

Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah didukung struktur kerja yang cukup jelas. Koordinasi internal dilakukan melalui komunikasi rutin dan pembahasan administrasi, sementara keterlibatan komite madrasah membantu menjaga hubungan dengan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan program tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar setiap petugas menjalankan kewenangannya sesuai prosedur serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pendataan maupun penetapan penerima bantuan.

Penelitian ini diperkuat oleh Septiyani (2022) yang mengkaji implementasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang. Penelitian tersebut menemukan beberapa kendala berupa koordinasi yang belum optimal dengan pemangku kepentingan, sosialisasi yang terbatas, dan kemampuan petugas yang perlu ditingkatkan. Temuan tersebut relevan dengan pentingnya pembagian tugas dan penguatan koordinasi antarpetugas dalam pelaksanaan PIP di MI Talegong Asli.

Penelitian ini juga diperkuat oleh Falah (2024) yang mengkaji implementasi PIP pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program didukung oleh ketersediaan sumber daya dan kemampuan pelaksana menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan operasional. Namun, penelitian tersebut juga menemukan kendala pendataan dan koordinasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa kapasitas organisasi pelaksana berperan penting dalam mendukung ketepatan pelaksanaan program.

Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pelaksana PIP di MI Talegong Asli memiliki kecenderungan sikap yang mendukung keberlangsungan program. Kepala madrasah berupaya memastikan bantuan disalurkan sesuai ketentuan, sedangkan operator dan staf administrasi menjalankan tugas pendataan serta pemeriksaan dokumen. Guru dan wali kelas turut memberikan informasi dan pendampingan kepada orang tua siswa mengenai proses penerimaan bantuan.

Sikap tersebut mencerminkan adanya tanggung jawab dan komitmen dalam melaksanakan program. Ketelitian dalam pengelolaan data, keterbukaan informasi, serta kesediaan membantu orang tua menjadi unsur penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Meskipun demikian, komitmen pelaksana perlu diikuti dengan konsistensi penerapan kriteria penerima agar keputusan yang diambil tetap objektif dan tidak dipengaruhi hubungan personal maupun pertimbangan di luar ketentuan program.

Penelitian ini diperkuat oleh Ilham dan Soeharto (2018) melalui penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 3 Wonosari. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan program secara umum berada dalam kategori baik, dengan dukungan tim pelaksana yang berpengalaman dan kegiatan pemantauan berkelanjutan. Temuan tersebut relevan dengan pentingnya tanggung jawab dan konsistensi petugas dalam melaksanakan PIP di MI Talegong Asli.

Penelitian ini juga diperkuat oleh Zamjani (2019) yang mengkaji inklusivitas PIP bagi anak berkebutuhan khusus di lima daerah. Penelitian tersebut menyoroti kesesuaian pelaksanaan program dengan kebutuhan kelompok sasaran yang memiliki kerentanan dalam mengakses pendidikan. Hasil kajian ini memperkuat pentingnya sikap pelaksana yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik agar bantuan pendidikan dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan secara adil.

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam pelaksanaan PIP di MI Talegong Asli terjalin antara pihak madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, bank penyalur, dan orang tua siswa. Informasi yang diterima madrasah diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti, termasuk melalui wali kelas dan pertemuan dengan orang tua. Apabila terjadi kendala dalam pencairan bantuan, pihak madrasah membantu memfasilitasi komunikasi dengan pihak bank.

Komunikasi tersebut membantu penyampaian informasi mengenai kriteria penerima, kelengkapan administrasi, jadwal pencairan, dan mekanisme pemanfaatan dana. Namun, perbedaan tingkat pemahaman orang tua masih berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penyampaian informasi perlu dilakukan secara konsisten, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta disertai kesempatan bagi orang tua untuk memperoleh penjelasan ketika menghadapi kendala.

Penelitian ini diperkuat oleh Jumanah dan Rosita (2022) yang mengkaji evaluasi Program Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan. Kajian tersebut mengidentifikasi sejumlah hambatan pelaksanaan, termasuk keterbatasan sosialisasi, keterlambatan pencairan dana, dan proses verifikasi data. Temuan tersebut relevan dengan pelaksanaan PIP di MI Talegong Asli karena komunikasi yang jelas dan berkelanjutan dibutuhkan untuk mengurangi kesalahpahaman serta membantu kelancaran proses administrasi.

Penelitian ini juga diperkuat oleh Herlinawati, Indriyanto, Fajarini, dan Sudiyono (2018) dalam kajian implementasi Program Indonesia Pintar yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. Kajian tersebut membahas pelaksanaan subsidi pendidikan bagi peserta didik miskin, termasuk ketepatan penerimaan dan pemanfaatan bantuan. Hasil kajian ini relevan dengan perlunya penyampaian informasi yang memadai kepada penerima dan orang tua agar pelaksanaan program sesuai tujuan dan prosedur yang ditetapkan.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Salopa yang sebagian bekerja pada sektor informal menjadikan PIP sebagai salah satu bentuk dukungan penting untuk membantu keberlangsungan pendidikan anak. Bantuan yang diterima dapat

meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan sekolah, terutama bagi peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Dari sisi sosial, hubungan kekeluargaan dalam masyarakat dapat membantu pihak madrasah memperoleh informasi mengenai kondisi keluarga siswa. Namun, kedekatan sosial juga berpotensi menimbulkan kecemburuan apabila masyarakat menilai penetapan penerima bantuan belum sepenuhnya adil. Oleh karena itu, transparansi kriteria dan ketepatan pendataan menjadi hal yang penting. Sementara itu, dukungan kebijakan pemerintah menjadi landasan bagi pelaksanaan program, yang perlu disertai koordinasi antara lembaga terkait agar bantuan dapat menjangkau sasaran secara tepat.

Penelitian ini diperkuat oleh Nadeak, Rahmawati, Prabawati, dan Suprapto (2026) yang mengkaji implementasi Program Indonesia Pintar dalam mendukung kesetaraan akses pendidikan dasar menuju Sustainable Development Goals (SDGs) 4. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa PIP berkontribusi dalam mendukung akses pendidikan, terutama bagi kelompok ekonomi terbawah. Temuan ini relevan dengan kondisi masyarakat di Kecamatan Salopa karena bantuan pendidikan dapat membantu mengurangi hambatan ekonomi yang dihadapi keluarga dalam menyekolahkan anaknya.

Penelitian ini juga diperkuat oleh Ainur Haqiqi dan Prabawati (2019) melalui penelitian evaluasi Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran, pemerataan bantuan, dan waktu pencairan. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan PIP agar bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga diterima oleh peserta didik yang benar-benar membutuhkan.

SIMPULAN

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di MI Talegong Asli Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya secara umum berjalan cukup baik dalam mendukung keberlangsungan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Pelaksanaan program didukung kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, pembagian tugas, komitmen pelaksana, komunikasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, ketepatan sasaran dan kendala pencairan tetap perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pihak madrasah disarankan meningkatkan pemutakhiran dan verifikasi data serta sosialisasi kepada orang tua, sedangkan Kementerian Agama dan pihak terkait perlu memperkuat pengawasan dan koordinasi agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Ainur Haqiqi, N. M. Q. Y., & Prabawati, I. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Publika, 7(8). Artikel Jurnal.

Falah, R. (2024). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Tingkat SMA/SMK (Studi Kasus Pada SMA Negeri 1 Dan SMK Negeri 1 Di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat). Public Administration Journal (PAJ), 8(2). Artikel Jurnal.

Hamdi, S., Setiawan, R., & Musyadad, F. (2020). Evaluation Of The Implementation Of Indonesia Pintar Program In Vocational School. Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 24(1). Https://Doi.Org/10.21831/Pep.V24i1.32603

Herlinawati, Indriyanto, B., Fajarini, C. D., & Sudiyono. (2018). Kajian Implementasi Program Indonesia Pintar. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan. Repositori Kemendikbud.

Islamy, M. I. (1986). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Ilham, M., & Soeharto. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 8(5). Https://Doi.Org/10.21831/Elektro.V8i5.13549

Jumanah, & Rosita, H. (2022). Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. The Indonesian Journal Of Public Administration, 8(2), 72–84. Https://Doi.Org/10.52447/Ijpa.V8i2.6042

Nadeak, N., Rahmawati, M., Prabawati, I., & Suprapto, F. A. (2026). Analisis Implementasi Program Indonesia Pintar Dalam Mendukung Kesetaraan Akses Pendidikan Dasar Menuju Sdgs 4. SANTINA: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik. Artikel Jurnal.

Nugroho, D. Riant. (2008). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Purnama, R., & Dewi, M. P. (2024). Evaluation Of The Indonesia Pintar Program At The Junior High School Level In Bandung Regency. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 21(2). Https://Doi.Org/10.21831/Socia.V21i2.81351

Rijal, M. K., Fathurrahman, & Pranajaya, S. A. (2018). Evaluasi Program Indonesia Pintar Di Madrasah Kota Balikpapan. Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran, 5(3), 15–33. Https://Doi.Org/10.21093/Twt.V5i3.2120

Romanti, R., Aguswan, & Ferizko, A. (2023). Implementasi Program Indonesia Pintar (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri 117 Pekanbaru). Jurnal Ilmiah Publika, 11(1). Https://Doi.Org/10.33603/Publika.V11i1.8709

Septiyani, A. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang [Skripsi, Universitas Sebelas April]. Repositori UNSAP.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta.

Kirm Dapus Van Meter 1975

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society,* *6*(4), 445–488. Https://Doi.Org/10.1177/009539977500600404

Zamjani, I. (2019). Inklusivitas Program Indonesia Pintar: Studi Kasus Pelaksanaannya Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Lima Daerah. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 4(1), 15–32. Https://Doi.Org/10.24832/Jpnk.V4i1.1095